



Fiscal Decentralization and Institutional Legacy: Explaining Variations in Human Development Outcomes in Banyumas and Banjarnegara Regencies

Hibatulloh Akbar Novianto¹, Rivaldi Mahardika², Athira Zahroh Firdausi Ramadhani³
Master Program in Politics and Government^{1,2,3}

Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

Email correstpondence : hibatullohakbarnovianto2000@mail.ugm.ac.id

Abstract

Purpose : This study aims to analyze how fiscal capacity, development priorities, and historical capacity contribute to variations in human development outcomes between Banyumas Regency and Banjarnegara Regency in the context of decentralization

Design/methodology/approach : This research is a qualitative research with a descriptive comparative approach and design *Most Similar System Design* (MSSD). The analysis was conducted through three interrelated stages and integrated through analysis of BPS documents, the RPJMD, official documents, and several scientific articles supporting the research.

Findings : Research shows that variations in development outcomes between Banyumas and Banjarnegara are influenced by the interaction of fiscal capacity, development priorities, and historical institutional legacies. Institutional legacies shape initial regional capacities, which then influence their ability to leverage decentralization, resulting in differences in sustainable Human Development Index (HDI) outcomes.

Practical Implication : The results of this study have important implications for the design of decentralization policies, where the fiscal transfer mechanism needs to be reviewed and reconsidered by taking into account the historical capacity of each region, and needs to be designed asymmetrically in accordance with the shortcomings and needs of development priorities so that in the era of autonomy it is not left further behind, and it is necessary to add an institutional historical dimension in reading the variations in development achievements between regions.

Originality/value : This research integrates the perspectives of fiscal decentralization and historical institutionalism through design *Most Similar System Design* (MSSD). Different from previous studies that position fiscal capacity as a contemporary factor, this study shows that fiscal capacity is the result of historical institutional trajectories that shape variation outcome development

Keywords : Human Development Index (HDI), Historical Institutionalism, Fiscal Decentralization

Paper type : Research Article

Desentralisasi Fiskal dan Warisan Institusional: Menjelaskan Variasi Outcome Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta kapasitas historis turut memengaruhi adanya variasi *outcome* pembangunan manusia antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dalam konteks desentralisasi

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif dan desain *Most Similar System Design* (MSSD). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan dan diintegrasikan melalui analisis pada dokumen BPS, RPJMD, dokumen resmi, serta beberapa artikel ilmiah yang mendukung penelitian.

Temuan : Penelitian menunjukkan bahwa variasi *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara dipengaruhi oleh interaksi kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan warisan institusional historis. Warisan kelembagaan membentuk kapasitas awal daerah yang kemudian memengaruhi kemampuan dalam memanfaatkan desentralisasi, sehingga menghasilkan perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang berkelanjutan.

Implikasi Praktis : Hasil penelitian ini berimplikasi penting bagi desain kebijakan desentralisasi, dimana mekanisme transfer fiskal kiranya perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan kapasitas historis dari tiap daerah, serta perlu dirancang asimetris sesuai dengan kekurangan dan kebutuhan prioritas pembangunan agar di era otonomi tidak makin tertinggal, serta perlu menambahkan dimensi historis institusional dalam membaca varian capaian pembangunan antar daerah.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini mengintegrasikan perspektif desentralisasi fiskal dan *historical institutionalism* melalui desain *Most Similar System Design* (MSSD). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menempatkan kapasitas fiskal sebagai faktor kontemporer, studi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal merupakan hasil trajektori institusional historis yang membentuk variasi *outcome* pembangunan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Historis institusional, Desentralisasi Fiskal

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Desentralisasi dalam beberapa literatur terdahulu menunjukkan munculnya perkembangan positif bagi daerah seperti inovasi dan kemandirian, pembuatan kebijakan yang deliberatif serta meningkatnya pendapatan daerah (Guo et al., 2020; Wakarmamu & Indrayono, 2019). Hal tersebut dikarenakan desentralisasi mampu menciptakan ruang bagi pemerintah daerah agar lebih leluasa merancang kebijakan serta pengelolaan sumber daya berdasarkan karakteristik lokal masing-masing melalui pemindahan kuasa secara administratif, fiskal, dan politik (Rondinelli, 1981; Tiebout, 1956). Dalam konteks Indonesia, Salah satu bentuk implementasi desentralisasi terlihat pada otonomi khusus Papua, yang menempatkan desentralisasi sebagai instrument untuk mengakomodasi karakteristik lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui kewenangan yang bersifat khusus (Firman & Sofian, 2025). Namun demikian literatur yang ada menunjukkan bahwa optimisme dari desentralisasi tersebut tidak langsung otomatis melahirkan pemerataan pembangunan. Keberhasilannya bergantung pada kapasitas daerah dalam memanfaatkan ruang otonomi yang diberikan, daerah dengan kapasitas lemah cenderung lebih tertinggal, jika tanpa ada mekanisme penyeimbang yang jelas desentralisasi justru berpotensi akan memperburuk ketimpangan antar wilayah (Bardhan, 2002; Smoke, 2003).

Bukti empiris dari konteks berbagai negara berkembang memperkuat kekhawatiran tersebut. Dalam studi komparatif lintas negara yang diterbitkan *World Development* menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan berbeda secara signifikan antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara berkembang menunjukkan efek yang lebih terbatas karena lemahnya kapasitas institusional, rendahnya otonomi pajak subnasional, serta kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung (Canavire-Bacarreza et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, temuan (Pepinsky & Wihardja, 2011) menegaskan bahwa perbedaan capaian pembangunan antar daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas tata Kelola daerah daripada besaran dana transfer dari pemerintah pusat. Lebih lanjut dalam studi panel terhadap 394 kabupaten/kota di Indonesia selama 16 tahun menemukan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah meningkatkan investasi pada sektor kesehatan dan infrastruktur, terutama pada daerah yang sebelumnya memiliki tingkat pembangunan infrastruktur lebih rendah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa desentralisasi politik tanpa dukungan kewenangan fiskal yang memadai tidak mampu meningkatkan akuntabilitas belanja publik dan justru memperbesar tekanan terhadap anggaran daerah (Kis-Katos & Sjahrir, 2017). Temuan-temuan tersebut menunjukkan desentralisasi fiskal, meskipun memberikan kewenangan yang setara kepada seluruh daerah, namun keluaran dari pembangunan bergantung pada seberapa besar kapasitas awal setiap daerah dan kemampuan daerah mengelola kewenangan tersebut.

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara menjadi kasus yang relevan, dimana sama-sama berada dalam lingkup eks-Karesidenan Banyumas. Kedua kabupaten secara historis berangkat dari kondisi geografis yang relatif serupa, yakni wilayah agraris pada kawasan selatan Jawa Tengah, berada di luar koridor

industri Pantura, dan tidak memiliki keunggulan sumber daya alam strategis seperti daerah penghasil migas ataupun pertambangan. Akan tetapi setelah berjalannya dua dekade desentralisasi, keduanya menunjukkan capaian yang berbeda secara signifikan. Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 tercatat memiliki *Human Development Index* sebesar 75,44 (BPS Kabupaten Banyumas, 2025) sedangkan Kabupaten Banjarnegara angka *Human Development Index* tercatat di angka 70,61 (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2025). Selain itu, Banyumas juga memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.903,89 miliar pada tahun 2024 sedangkan Banjarnegara Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sebesar Rp.384,79 miliar saja (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2025; BPS Kabupaten Banyumas, 2025). Perbedaan yang ada tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan penting, mengapa dua daerah yang berangkat dari karakteristik awal yang relatif serupa dan beroperasi dalam sistem desentralisasi yang sama justru menghasilkan capaian pembangunan yang berbeda?

Penelitian ini membatasi *outcome* pembangunan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI) karena indikator tersebut merepresentasikan dimensi pokok dari pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat secara lebih langsung dan komprehensif dibandingkan indikator ekonomi makro semata, IPM mengintegrasikan tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan serta penghidupan yang layak (Badan Pusat Statistik, 2025). Pilihan ini sejalan dengan argumentasi bahwa keberhasilan desentralisasi bukan hanya diukur dari pertumbuhan fiskal daerah semata, namun dari sejauh mana ruang otonomi yang dimiliki tiap daerah bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah studi mengenai desentralisasi yang ada di Indonesia menunjukkan tentang variasi capaian pembangunan yang ada di era desentralisasi. (Iqbal & Woyanti, 2025) dan (Fitriana & Gravitiani, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh besar terhadap perbedaan pembangunan daerah pada tiap Provinsi di pulau Jawa dan pada kawasan Barlingmascakeb. Pola serupa juga terlihat pada skala nasional, dimana (Santi & Iskandar, 2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan capaian indikator pembangunan wilayah. Sementara itu (Mu'minah & Tjenreng, 2025) perbedaan dan ketimpangan dari variasi *outcome* itu turut dipengaruhi oleh akses infrastruktur, kebijakan fiskal, investasi yang tidak merata, kualitas sumber daya manusia, serta faktor geografis. Hal ini diperkuat oleh (Fitriah & Suryaningrum, 2023) yang menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi, sehingga daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah cenderung mengalami ketimpangan yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cerminan indikator dari kemandirian fiskal sekaligus penentu ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program-program prioritas pembangunan (Hasanah et al., 2025; Linadi et al., 2026). Sebaliknya daerah yang memiliki ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung memiliki keterbatasan dalam menentukan arah prioritas

pembangunan karena sebagian besar pengeluarannya telah ditetapkan melalui skema transfer dari pusat (Handraini et al., 2024). Fenomena tersebut tergambar jelas dalam kasus Kabupaten Sumedang, dimana Kabupaten tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi sehingga membatasi ruang gerak pemerintahan daerah dalam merumuskan prioritas pembangunannya sendiri, meskipun secara formal telah memperoleh kewenangan otonomi (Akadun, 2024).

Pada level implementasi, kapasitas institusional lokal menjadi faktor penentu sejauh mana daerah mampu beradaptasi terhadap perubahan rezim desentralisasi fiskal. Dalam studi kasus Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kesiapan tata Kelola dan kemampuan koordinasi lintas agensi serta inovasi digital dalam administrasi fiskal. Daerah dengan kapasitas adaptif tinggi mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah bahkan di Tengah tekanan reformasi regulasi, sementara daerah dengan kapasitas terbatas cenderung tertinggal meskipun memperoleh mandat kebijakan yang sama dari pemerintah pusat (Suryawati et al., 2026). Temuan pada level nasional turut memperkuat pola tersebut dimana studi panel yang dilakukan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode 2016-2021 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja tata Kelola pemerintahan daerah, dengan dampak yang lebih luas dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah di luar pulau Jawa (Astria & Khoirunurrofik, 2024). Dengan demikian, perbedaan kapasitas fiskal tidak hanya menentukan banyaknya sumber daya yang dimiliki, namun turut memengaruhi kebebasan daerah dalam menentukan agenda prioritas pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian-penelitian yang ada tersebut memperlihatkan bahwa variasi *outcome* pembangunan banyak dijelaskan oleh kapasitas fiskal dan faktor struktural kontemporer. Namun penelitian tersebut masih belum menelusuri asal-usul terbentuknya kapasitas tersebut sebagai hasil trajektori *historical institutionalism* yang terakumulasi jauh sebelum desentralisasi diberlakukan.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan perspektif desentralisasi fiskal dan *historical institutionalism* untuk menjelaskan variasi *outcome* pembangunan pada dua daerah dengan karakteristik awal yang relatif serupa. Dalam perspektif *historical institutionalism* dijelaskan bahwa kapasitas suatu institusi sering dibentuk oleh trajektori pembangunan masa lalu yang menciptakan pola lintasan yang berlanjut dari masa ke masa (North, 1990; Pierson, 2000). Melalui mekanisme *path dependence* pilihan kelembagaan di masa lalu mengalami perubahan-perubahan besar pada titik *critical junctures*, yakni periode ketika ketika keputusan kebijakan tertentu menghasilkan dampak jangka panjang yang menentukan arah perkembangan institusi berikutnya. (Rondinelli, 1981) menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sering kali dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan yang terbentuk sebelumnya, Daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kebijakan desentralisasi.

Artikel ini berargumen bahwa variasi *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara tidak cukup dijelaskan melalui desain desentralisasi ataupun faktor geografis semata, namun merupakan hasil interaksi antara kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah, dan warisan institusional historis yang terbentuk sebelum era desentralisasi, yang pada akhirnya membentuk kemampuan masing-masing daerah dalam memanfaatkan ruang otonomi yang tercermin dalam perbedaan capaian IPM.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah, dan faktor historis memengaruhi variasi *outcome* pembangunan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dalam konteks desentralisasi. Dengan demikian penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa dua daerah yang memiliki karakteristik yang relatif serupa dapat menghasilkan capaian pembangunan yang berbeda setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif deskriptif dan desain *most similar system design* (MSSD). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini mengandalkan analisis dokumen kebijakan, sumber historis, dan data statistik sekunder yang diinterpretasikan secara deskriptif komparatif untuk memahami mekanisme di balik perbedaan *outcome* pembangunan antara dua daerah di era desentralisasi kontemporer. Desain MSSD digunakan karena logika eliminasi variabel yang dimiliki dimana terdapat dua kasus yang memiliki banyak kesamaan namun menunjukkan hasil yang berbeda, maka perbedaan tersebut mungkin bisa lebih dibaca dan dipahami melalui variabel yang tidak sama diantara keduanya (Przeworski & Teune, 1970). Dalam penerapan MSSD, pemilihan kasus dilakukan terhadap sistem yang semirip mungkin secara karakteristik dasar agar sebanyak mungkin variabel lain dapat dianggap konstan, sehingga faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan *outcome* dapat lebih mudah diidentifikasi (Seawright & Gerring, 2008). MSSD tidak hanya digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara deduktif, namun juga dapat diterapkan secara induktif dengan memulai dari variasi *outcome* yang berbeda pada kasus yang banyak memiliki kesamaan (Anckar, 2008).

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dipilih sebagai kasus komparatif karena keduanya berada dalam satu lingkup wilayah yang sama yakni eks-Karesidenan Banyumas, karakter ekonomi agraris, serta posisi di luar koridor industri pantura. Namun dari kedua wilayah tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam kapasitas fiskal yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan capaian pembangunan terutama indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan seluruhnya dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang bersumber dari publikasi BPS dari Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Banjarnegara, BPS Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan mengenai perbandingan pembangunan dari kedua wilayah, serta indikator yang digunakan meliputi PAD, total pendapatan dari kedua daerah, Indeks Pembangunan

Manusia, dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 untuk menganalisis prioritas pembangunan. Dan terakhir adalah literatur akademik dan sumber historis untuk menganalisis trajektori kelembagaan.

Analisis dilakukan dalam tiga tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara deskriptif komparatif dengan membandingkan pola serta kecenderungan indikator-indikator tersebut secara berdampingan. Tahap pertama adalah analisis komparatif kuantitatif deskriptif, Dimana data IPM dari tahun 2002 hingga 2025 dan data kapasitas fiskal tahun 2024 dibandingkan berdampingan untuk melihat dan mengidentifikasi pola dan besaran perbedaan *outcome* dari kedua daerah, Berikutnya adalah menganalisis dokumen RPJMD secara tematik dengan mengacu pada prosedur analisis dokumen sebagaimana dikembangkan oleh (Bowen, 2009), guna melihat arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dari kedua dokumen untuk mengidentifikasi konsistensi dan orientasi pembangunan dari kedua daerah. Dan terakhir adalah analisis *historical institutionalism*, dengan pendekatan penelusuran *critical junctures* sebagaimana dikembangkan oleh (Capoccia & Kelemen, 2007) dimana trajektori kelembagaan kedua daerah ditelusuri menggunakan sumber historis untuk mengidentifikasi *critical junctures* yang membentuk perbedaan kapasitas awal sebelum era otonomi daerah. Ketiga tahapan tersebut diintegrasikan guna menjelaskan mengapa dua daerah yang secara struktural relatif mirip, justru berkembang dengan *outcome* yang berbeda setelah dua dekade pelaksanaan otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Outcome Pembangunan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara

Pasca-Reformasi kebijakan terkait desentralisasi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dan mendasar kepada pemerintah daerah dari yang sebelumnya sangat sentralistik oleh pusat, ketidakpuasan masyarakat akhirnya mendorong reformasi terhadap peran dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusannya (Lathifah et al., 2024). Sudah lebih dari dua dekade perubahan tersebut terjadi dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan maksud guna mendorong kemajuan daerah serta mengurangi ketimpangan antar daerah di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* menjadi indikator dalam mengukur aspek-aspek penting dari kualitas hasil pembangunan, khususnya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Sofilda et al., 2023)

Tabel 1: Perbandingan IPM antara Banyumas dan Banjarnegara

IPM	Banyumas	Banjarnegara	Selisih	Rerata Provinsi
2002	66,70	63,70	3,00	66,30
2005	70,70	67,30	3,40	69,80
2010	72,60	69,91	2,69	72,49

2015	69,89	64,73	5,16	69,49
2020	71,98	67,45	4,53	71,87
2025	75,44	70,61	4,80	74,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah penulis

Dalam kasus antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara pada masa atau titik awal dijalankannya desentralisasi sebenarnya sudah memiliki perbedaan namun tidak begitu jauh. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah dalam laporan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2005 yang menunjukkan data dimana Indeks Pembangunan Manusia tiap Kabupaten di Jawa Tengah pada Tahun 2002 diperlihatkan bahwa perbedaan diawal desentralisasi antara Banyumas dan Banjarnegara hanya berbeda 3,00 angka. Kabupaten Banyumas berada pada Angka *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,7 sedangkan Kabupaten Banjarnegara berada pada angka 63,7 dengan angka IPM rerata provinsi sebesar 66,3 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005).

Sudah lebih dari 20 tahun program desentralisasi berjalan, namun data BPS terbaru dalam Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2026 menunjukkan pemerataan yang diharapkan dari adanya desentralisasi ternyata masih belum sepenuhnya berhasil karena data terbaru tahun 2025 justru memperlihatkan semakin memperlebar jarak selisih sebesar 4,80 dari IPM di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara yakni dengan angka 75,44 untuk Kabupaten Banyumas dan 70,61 untuk Kabupaten Banjarnegara, dengan rerata IPM provinsi sebesar 74,77 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026).

Pola temuan yang terlihat dalam Tabel 1 tidak bersifat acak, namun menunjukkan bahwa jika desentralisasi benar-benar menciptakan pemerataan, seharusnya gap antara kedua Kabupaten mengecil seiring waktu. Akan tetapi realita berkata sebaliknya, gap atau selisih yang ada justru semakin melebar. Fenomena ini sejalan dengan argumen (Pierson, 2000) bahwa daerah yang sejak awal memiliki kapasitas lebih kuat cenderung mendapat manfaat lebih besar dari desentralisasi, sehingga perbedaan yang ada sebelumnya bukan berkurang namun semakin menguat dari waktu ke waktu.

Meskipun berada dalam sistem desentralisasi yang sama, Banyumas dan Banjarnegara menghasilkan *outcome* pembangunan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi pertanyaan penting yang perlu dijelaskan lebih lanjut melalui analisis mengenai kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan dari kedua daerah. Salah satu faktor yang diduga memainkan peran penting adalah perbedaan kapasitas fiskal kedua daerah, yakni seberapa besar kemampuan masing-masing daerah dalam menghimpun sumber daya sendiri dan mengalokasikannya ke program pembangunan prioritas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat.

2. Kapasitas Fiskal dan Prioritas Pembangunan

Perbedaan *outcome* pembangunan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh pemberian otonomi, tetapi juga oleh

kapasitas daerah dalam memanfaatkannya ke dalam prioritas pembangunan yang efektif.

Tabel 2. Perbandingan Kapasitas Fiskal Tahun 2024

INDIKATOR	BANYUMAS	BANJARNEGARA
Total Pendapatan Daerah	Rp.3,669 Triliun	Rp.2,330 Triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.903 Miliar	Rp.384 Miliar
Rasio PAD/Total Pendapatan	24,63%	16,51%

Sumber: BPS Banyumas 2026, BPS Banjarnegara 2026, dan diolah oleh penulis

Berdasarkan data dalam Banyumas Dalam Angka tahun 2026 menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 lebih besar dengan total pendapatan sebesar Rp. 3.669.275.474.408 atau 3,669 Triliun (BPS Kabupaten Banyumas, 2026), sedangkan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Banjarnegara Dalam Angka Tahun 2026 dengan kapasitas fiskal ditahun yang sama hanya memperoleh Rp. 2.330.521.097,690 atau 2,330 Triliun (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2026). Kemudian perbedaan tersebut juga terlihat dari besaran kemampuan kedua daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada tahun 2024 PAD dari Kabupaten Banyumas mencapai Rp. 903.890.297.522 atau sebesar 903 Miliar sedangkan PAD Kabupaten Banjarnegara hanya sebesar Rp. 384.788.233.000 atau sebesar 384 Miliar.

Perbedaan yang ada tersebut menunjukkan bagaimana Kabupaten Banyumas memiliki tingkat kemandirian fiskal ketimbang Kabupaten Banjarnegara, karena jika dihitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Kontribusi PAD di Banyumas mencapai 24,63% atau kurang lebih seperempat dari total pendapatan daerah sedangkan kontribusi PAD di Banjarnegara hanya berada di angka 16,51% sehingga Banyumas memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam membiayai program pembangunan berdasarkan prioritas daerahnya tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat. Namun demikian, kapasitas fiskal saja tidak cukup dalam menjelaskan mengapa perbedaan *outcome* pembangunan terus bertahan dan justru semakin melebar selama lebih dari dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi. Kapasitas Fiskal pada dasarnya hanya menyediakan sumber daya, sedangkan dampak dari pembangunan sangat dipengaruhi dari bagaimana sumber daya tersebut diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang efektif. Dengan demikian, selain kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah menjadi faktor penting yang perlu dianalisis untuk memahami variasi capaian pembangunan yang berbeda di kedua wilayah.

Prioritas pembangunan dari kedua daerah tersebut dianalisis melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan pembangunan kedua daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2021a), terlihat bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus yang relatif konsisten dibangun dari 2019 hingga 2023 seperti peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Bahkan di akhir periode RPJMD tersebut, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan

sumber daya manusia melalui konsep smart people dan smart government tetap menjadi prioritas. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 (Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, 2017), menunjukkan bahwa arah kebijakannya cukup berbeda. Sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tetap mendapat perhatian melalui berbagai program yang ada, namun perhatian kebijakan tersebut dibagi ke berbagai agenda lain seperti kebencanaan, infrastruktur dasar, pertanian, sanitasi, dan pengembangan ekonomi lokal sehingga fokus pembangunan relatif lebih tersebar dibandingkan Banyumas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kapasitas fiskal semata, namun juga berkaitan dengan bagaimana kapasitas fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah. RPJMD Banyumas menunjukkan fokus yang relatif konsisten pada pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu RPJMD Banjarnegara menunjukkan prioritas yang lebih tersebar pada berbagai sektor seperti kebencanaan, infrastruktur dasar, pertanian, dan ekonomi lokal. Perbedaan orientasi kebijakan ini mengindikasikan bahwa Banyumas menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda yang lebih sentral dibandingkan Banjarnegara. Dengan demikian, kombinasi dari kapasitas fiskal yang kuat dengan pembangunan yang lebih konsisten dan terarah pada pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang membantu menjelaskan mengapa *outcome* desentralisasi di Banyumas mampu menghasilkan capaian pembangunan yang lebih baik ketimbang Banjarnegara. Namun penjelasan ini baru menjawab apa yang membedakan keduanya dan masih kurang menjawab mengapa perbedaan kapasitas tersebut terbentuk sejak awal. Keduanya terbentuk oleh warisan historis dan institusional yang terakumulasi jauh sebelum desentralisasi dimulai.

3. *Faktor Historis dan Perbedaan Kapasitas*

Kapasitas kelembagaan suatu daerah tidak lahir dalam ruang kosong melainkan hasil dari akumulasi dari pilihan institusional dan investasi yang terjadi di masa lampau (North, 1990). Dalam memahami perbedaan kapasitas yang ada antara Banyumas dan Banjarnegara ketika memasuki desentralisasi perlu menelusuri *critical junctures* yang membentuk trajektori kelembagaan kedua daerah jauh sebelum otonomi daerah diberlakukan.

Critical Junctures atau titik kritis pertama adalah ketika Kabupaten Banyumas yang telah menjadi bagian daerah kekuasaan kolonial ditetapkan dengan status sebagai karesidenan pada tahun 1830 karena lokasi yang strategis dan dinilai produktif untuk meningkatkan kapital Belanda saat itu (Arinda et al., 2017), kemudian menjadi titik krusial karena menjadi pusat administrasi karesidenan sehingga menjadi tempat konsentrasi investasi kolonial, seperti pembangunan stasiun dan jalur dan stasiun kereta api, jaringan jalan, kantor pemerintahan, serta institusi layanan publik yang tidak dimiliki di daerah sekitarnya (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2021b). Akibatnya, menciptakan basis awal bagi akumulasi kapasitas birokrasi, jaringan sosial-ekonomi, dan ekosistem pelayanan publik dari generasi ke generasi. Banjarnegara yang tidak memiliki posisi administratif setara dalam hierarki

kolonial, tidak mendapat efek akumulatif ini sehingga berkembang dengan basis kelembagaan yang lebih terbatas.

Titik kritis kedua semakin menguat pasca kemerdekaan dengan berdirinya Perguruan Tinggi yakni Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto pada tahun 1963 yang kemudian turut menciptakan *feedback loop* yang memperkuat kapasitas daerah secara berkelanjutan melalui penciptaan ekosistem SDM terdidik dan memperkuat kapasitas birokrasi lokal secara signifikan, sebaliknya Banjarnegara di periode yang sama masih terbatas kapasitasnya secara administratif, basis ekonomi serta minimnya institusi pendidikan tinggi maupun infrastruktur regional yang memadai yang kemudian membatasi kapasitas birokrasi lokal, yang pada akhirnya membatasi kemampuan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan daerah secara efektif.

Akumulasi dari dua titik kritis tersebut tidak bersifat abstrak namun bisa dibuktikan secara empiris dengan melihat data kapasitas infrastruktur dan birokrasi dari Banyumas dalam angka 2003 (BPS Kabupaten Banyumas, 2003) dan Banjarnegara dalam angka 2003 (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2003) ketika desentralisasi resmi diberlakukan melalui UU nomor 22 tahun 1999 kedua daerah tersebut tidak memulai dari titik yang benar-benar sama.

Tabel 3. Perbandingan Kapasitas Infrastruktur Pembangunan Manusia dan Birokrasi pada Awal Desentralisasi tahun 2002

Indikator	Banyumas	Banjarnegara
SMP	133	53
SMA	33	13
SMK	48	10
Perguruan Tinggi	11	0
Rumah Sakit	13	3
Puskesmas	39	34
Pegawai Dinas Daerah	3.375	1.478

Sumber: BPS Banyumas 2003, BPS Banjarnegara 2003, dan diolah oleh penulis

Data diatas mengungkapkan bahwa pertama, kesenjangan fasilitas pendidikan semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Dimana Banyumas memiliki 2,5 kali lipat lebih banyak pada tingkat SMP dan SMA, 4,8 kali lipat pada tingkat SMK, serta memiliki 11 perguruan tinggi sementara Banjarnegara tidak memiliki satupun. Pola tersebut mencerminkan mekanisme *path dependence* yang bekerja selama lebih dari satu abad. Dimana fondasi kelembagaan kolonial serta muncul adanya Unsoed sebagai perguruan tinggi turut menciptakan ekosistem yang memungkinkan tumbuhnya institusi pendidikan lanjutan secara organik, sedangkan Banjarnegara tanpa adanya fondasi yang serupa belum mampu mengembangkan ekosistem yang sebanding. Kedua, kesenjangan fasilitas kesehatan yang memperlihatkan logika yang sama. Jumlah puskesmas relatif sebanding, namun keberadaan jumlah rumah sakit bergantung pada ekonomi dan ketersediaan tenaga medis menunjukkan jumlah yang lebih banyak di Banyumas membuktikan bahwa keunggulan Banyumas bukan produk kebijakan dari pemerintah pusat melainkan

akumulasi kapasitas historis yang berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga, kapasitas aparatur birokrasi yang ada menunjukkan kesenjangan paling relevan dalam kemampuan daerah memanfaatkan desentralisasi. Jumlah pegawai dinas di Banyumas mencapai 3.375 orang sedangkan Banjarnegara hanya berjumlah 1.478 orang. Banyaknya aparatur yang ada menunjukkan kapasitas teknis yang lebih besar dalam merancang dan mengeksekusi program pembangunan. sehingga ketika desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas, Banyumas memiliki SDM aparatur yang lebih siap dalam mengisi dan memanfaatkan kewenangan tersebut.

Warisan sejarah tersebut memengaruhi capaian pembangunan pembangunan manusia saat ini melalui tiga jalur yang saling berkaitan, yakni berkembangnya lembaga pendidikan sejak masa kolonial dan diperkuat dengan lahirnya Unsoed dalam menciptakan stok tenaga terdidik yang lebih besar sehingga memperkuat kualitas aparatur dan kemampuan daerah dalam mengelola otonomi. Kedua, jaringan transportasi dan ekosistem ekonomi dan layanan yang lebih matang menciptakan basis pajak dan retribusi yang lebih beragam, yang tercermin dari kemampuan Banyumas menghasilkan PAD lebih besar. Terakhir adalah pengalaman panjang Banyumas sebagai pusat administrasi regional membuat birokrasi Banyumas lebih terbiasa mengelola berbagai urusan pemerintahan. Kapasitas tersebut yang kemudian menjadi modal penting dalam era desentralisasi ketika adanya kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri.

Dengan demikian, faktor historis dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai penentu tunggal pembangunan, melainkan sebagai pembentuk kapasitas awal daerah sebelum desentralisasi. Ketika desentralisasi memberikan ruang otonomi yang lebih besar, kapasitas awal tersebut membantu Banyumas memanfaatkan peluang yang ada secara lebih efektif. Oleh karena itu, perbedaan *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan desentralisasi dan kapasitas historis yang berbeda pada masing-masing daerah. Temuan ini mendukung argumentasi (Smoke, 2003) dan (Bardhan, 2002) bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan. Sebaliknya, desentralisasi cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada daerah yang sejak awal telah memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh transfer kewenangan dari pusat, tetapi juga oleh kondisi awal yang dimiliki masing-masing daerah ketika memasuki era otonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan *outcome* pembangunan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara tidak dapat dijelaskan hanya oleh desain desentralisasi yang sama ataupun faktor geografis semata. Meskipun kedua daerah memperoleh kewenangan otonomi yang serupa, keduanya memiliki kapasitas yang berbeda dalam memanfaatkan peluang desentralisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Banyumas memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat serta perencanaan pembangunan yang lebih konsisten berorientasi pada pembangunan manusia dibandingkan Banjarnegara. Kondisi tersebut turut berkontribusi pada capaian pembangunan yang lebih baik, terutama dalam indikator IPM.

Lebih lanjut, perbedaan kapasitas tersebut berkaitan dengan warisan historis yang berbeda. Posisi Purwokerto sebagai pusat administrasi regional sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan mendorong akumulasi sumber daya birokrasi, pendidikan, dan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan Banjarnegara. Ketika desentralisasi diterapkan, kapasitas awal tersebut memberikan keuntungan bagi Banyumas dalam memanfaatkan ruang otonomi yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa *outcome* desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga oleh kapasitas historis yang dimiliki daerah ketika memasuki era otonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan, melainkan dapat memperkuat perbedaan yang telah terbentuk sebelumnya apabila kapasitas awal antar daerah tidak sama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah praktis. Pertama, pada tingkat nasional, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri perlu mengevaluasi skema transfer fiskal khususnya DAU dan DAK, yang selama ini hanya mempertimbangkan celah fiskal dan kebutuhan anggaran saat ini, dengan mempertimbangkan juga indikator kapasitas kelembagaan yang berkembang secara historis, sehingga kabupaten dengan warisan institusional yang lebih lemah memperoleh dukungan yang lebih proporsional. Kedua, di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi sektor non-pertanian dan perbaikan tata kelola belanja, alih-alih terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Terakhir, Bappeda di kedua kabupaten perlu Menyusun RPJMD yang secara eksplisit mengaitkan dengan indikator capaian dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) agar capaian pembangunan manusia dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur dan terarah pada periode perencanaan berikutnya.

Namun demikian penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis kapasitas fiskal lebih banyak menggunakan indikator PAD dan rasio kemandirian fiskal, serta belum mengkaji secara rinci pola belanja daerah maupun realisasi anggaran sektoral. Kedua, analisis *historical institutionalism* dalam penelitian ini masih bersifat deskriptif analitis berbasis data sekunder dan belum didukung dengan wawancara mendalam dengan aktor kelembagaan di kedua daerah. Ketiga, penelitian ini belum memasukkan faktor kepemimpinan daerah dan dinamika politik lokal yang dapat memengaruhi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai mekanisme spesifik bagaimana warisan institusional historis ditransmisikan ke dalam kapasitas birokrasi kontemporer, serta memperluas studi komparatif ke kabupaten lain dalam eks karesidenan Banyumas untuk menguji generalisasi temuan ini secara lebih mendalam.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap desain kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pertama, mekanisme transfer fiskal perlu kembali mempertimbangkan perbedaan kapasitas historis dari tiap daerah tidak hanya kebutuhan fiskal dan tingkat ketimpangan terkini dari tiap daerah saja. Kedua,

program peningkatan kapasitas daerah perlu dirancang asimetris, maksudnya adalah memberikan dukungan yang lebih besar terhadap daerah yang mewarisi kapasitas kelembagaan yang lebih lemah sehingga tidak makin tertinggal dalam memanfaatkan peluang otonomi. Ketiga, evaluasi keberhasilan sistem desentralisasi perlu memasukkan dimensi historis institusional sebagai konteks penting dalam membaca variasi capaian pembangunan antar daerah. Dengan demikian, upaya mengurangi ketimpangan pembangunan manusia antardaerah tidak hanya diarahkan pada pemerataan sumber daya fiskal, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan yang berkembang dalam jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini menghasilkan catatan penting terhadap teori yang digunakan yakni pertama, perspektif *historical institutionalism* melalui konsep *path dependence* (North, 1990) dan *critical junctures* (Pierson, 2000) terbukti relevan dalam menjelaskan permasalahan perbedaan *outcome* desentralisasi di Indonesia. Kedua mekanisme tersebut berhasil menjelaskan bagaimana perbedaan trajektori kelembagaan antara Banyumas dan Banjarnegara sejak era colonial membentuk kesenjangan kapasitas fiskal dan capaian IPM yang semakin melebar hingga saat ini. Namun perspektif ini masih memiliki beberapa keterbatasan karena kurang mengakomodasi peran agensi aktor kontemporer. Temuan penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa perbedaan orientasi prioritas pembangunan dalam RPJMD yang merupakan produk pilihan kebijakan di masa kini turut memengaruhi lebarnya gap IPM di kedua daerah, dimensi yang tidak sepenuhnya dijelaskan melalui perspektif warisan historis saja. Kedua, temuan dari penelitian ini mencoba menantang asumsi dari teori desentralisasi fiskal klasik (Tiebout, 1956) bahwa pemberian otonomi akan mendorong berkurangnya tingkat perbedaan pembangunan antardaerah. Temuan menunjukkan bahwa selisih IPM antara Banyumas dan Banjarnegara yang semakin melebar mengonfirmasi argument (Bardhan, 2002) dan (Smoke, 2003) bahwa desentralisasi tidak otomatis melahirkan pemerataan ketika kapasitas awalnya berbeda. Sehingga teori mengenai desentralisasi fiskal perlu diperluas dengan mempertimbangan aspek kapasitas institusional awal dalam melihat apakah desentralisasi akan menghasilkan pemerataan atau justru malah menimbulkan ketimpangan pembangunan. Ketiga, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa kerangka integrasi antara perspektif desentralisasi fiskal dan *historical institutionalism* yang menempatkan kapasitas fiskal bukan sebagai faktor penjelas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil trajektori histori institusional. Kedepan kerangka ini perlu diperkaya dengan dimensi agensi aktor melalui pendekatan seperti *adaptive governance* (Suryawati et al., 2026), sehingga mampu menjembatani antara determinisme historis dan kemampuan daerah untuk berkembang secara aktif melalui inovasi kelembagaan yang adaptif.

REFERENCES

- Akadun, A. (2024). Analysis of Pseudo-Decentralization and Financial Dependency in the Implementation of Regional Autonomy in Sumedang Regency of Indonesia. *Public Policy and Administration*, 23(1), 9–22. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.23.1.33295>

- Anckar, C. (2008). On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(5), 389–401. <https://doi.org/10.1080/13645570701401552>
- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto Tahun 1937. *Journal of Indonesian History*, 6(1).
- Astriaana, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185–205. <https://doi.org/10.1257/089533002320951037>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS Kabupaten Banjarnegara. (2003). *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun 2003*. BPS Kabupaten Banjarnegara.
- BPS Kabupaten Banjarnegara. (2025). *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun 2025*. BPS Kabupaten Banjarnegara.
- BPS Kabupaten Banjarnegara. (2026). *Banjarnegara Dalam Angka 2026*.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2003). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka tahun 2003*. BPS Kabupaten Banyumas.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2025). *KABUPATEN BANYUMAS DALAM ANGKA 2025*. In Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Ed.), *BPS Kabupaten Banyumas*. BPS Kabupaten Banyumas.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2026). *Banyumas Dalam Angka 2026*. In *BPS Kabupaten Banyumas*.
- BPS Provinsi JawaTengah. (2005). *Jawa Tengah Dalam Angka 2005*.
- BPS Provinsi JawaTengah. (2026). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2026*. In S. A. Cahyono & I. T. Raharto (Eds.), *BPS Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 51). BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, 104742. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Capoccia, G., & Kelemen, R. D. (2007). The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism. *World Politics*, 59(3), 341–369. <https://doi.org/10.1017/S0043887100020852>
- Firman, & Sofian, M. (2025). Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afiriasi Orang Asli Papua di Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 522–540. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5797>

- Fitriah, L. D., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14720>
- Fitriana, A., & Gravitiani, E. (2022). ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN PER KAPITA DAN AKSES SANITASI LAYAK TERHADAP KEMISKINAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 45-56. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750%0Ahttps://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766%0Ahttps://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076%0Ahttps://doi.org/>
- Guo, S., Wen, L., Wu, Y., Yue, X., & Fan, G. (2020). Fiscal Decentralization and Local Environmental Pollution in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8661. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228661>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7225>
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950-2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Iqbal, M., & Woyanti, N. (2025). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *Ekonomi Dan Bisnis*, 21(02), 89-106.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344-365. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7223>
- Linadi, L., Ayu Kusuma, A. N., Billa, Z. S., Marchegiani, A. D., Ayu Puspita, L., Pradana, A. F., Hidayat, M. F., & Fitrie, R. A. (2026). Implementasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi, AKuntansi Dan Manajemen Nusantara*, 5(1), 7-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.789>
- Mu'minah, S., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1053>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. (2017). *Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022*.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2021a). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 2018 - 2023*.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2021b). *Sejarah Masa Kolonial di Kabupaten Banyumas*.
<https://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43489/sejarahmasakolonial>
- Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337-371.
<https://doi.org/10.1017/S1598240800007372>
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251-267.
<https://doi.org/10.2307/2586011>
- Przeworski, A., & Teune, H. (1970). The Logic of Comparative Social Inquiry. *American Political Science Review*, 64(4), 1255-1256. <https://doi.org/10.2307/1958372>
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
<https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490-506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research. *Political Research Quarterly*, 61(2), 294-308.
<https://doi.org/10.1177/1065912907313077>
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.
<https://doi.org/10.1002/pad.255>
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Nurhaida, D. (2023). DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021). *Media Ekonomi*, 31(1), 15-28. <https://doi.org/10.25105/me.v31i1.16516>
- Suryawati, D., Rohman, H., Anwar, Maulana, M. I., Handika, Y. R., Hanim, A. N., Muluk, M. R. K., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization: Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102606.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424. <https://doi.org/10.1086/257839>
- Wakarmamu, T., & Indrayono, Y. (2019). Spending and development in Papua province of Indonesia. *Management Science Letters*, 2131-2142.
<https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.021>